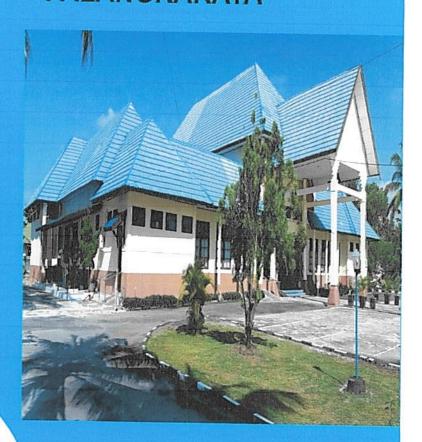


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Laporan ini memuat : Pendahuluan, Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Akreditasi Penjaminan Mutu, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya 8 Januari 2021

WAKIZKETUA,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARAPALANGKA RAYA

ANDRY ASAM, SH., MH NIP. 19710409 199603 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PTUN PALANGKA RAYA	. 3
Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
Keadaan Perkara Tingkat Banding	
Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
	. 20
B. PENYELESAIAN PERKARA	20
- Jumlah sisa perkara yang diputus	
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	36
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	36
	20
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SEDTIEN) ASI YASI DENGA	
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN - POSBAKUM	
- POSBAKUM	
- SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU	37
- PERKARA PRODEO	37
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	39
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan /pendidikan	
Mutasi	41
Promosi	
Pensiun	
Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	

BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNO	LOGI
	INFORMASI	50
	A. Pengelolaan Keuangan	
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
	reaction mornings	
	Implementasi E-Court di PTUN Palangka Raya	60
	Implementasi SIPP di PTUN Palangka Raya	68
DADA	DENVINCENT OF THE PROPERTY OF T	
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	73
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
	- Inovasi Pelayanan Publik	
BADVI	DENCAWAGAN	
DADVI	PENGAWASAN	
	A. Internal	80
	B. Evaluasi	81
BAB VI	I PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	
	B. Rekomendasi	

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara- negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak - haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pertama : sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum.

 Kedua : adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

 Pengawasan yang dilakukan bersifat "external control", karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.

- Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "control a posteriori", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
- Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "legalitas", karena hanya menilai dari segi hukum (rechmatigheid) - nya saja.

Pejabat administrasi di dalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inhaerent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa: "Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu". Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan - ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan,

kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan termuda dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hukum Acara Peradialan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada point d adalah " Untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam bidang tata usaha Negara diperlukan suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat ". Dari konsiderans tersebut diatas maka menjadi jelas, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kontrol Pengadilan kepada pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya merugikan kepentingan rakyat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dibaca dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi ". Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdiri, semua sengketa tata usaha Negara yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha Negara di wilayah hukum

provinsi Kalimantan Tengah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal tersebut sesuai pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1992 yang menyebutkan :

"Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat didalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimanta Timur ".

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu:

- Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
- Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
- Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
- Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
- Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
- Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
- Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
- Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;
- Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
- Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
- Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
- Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
- Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
- Kota PALANGKA RAYA

Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 0 45" Lintang Utara 3 30" Lintang Selatan dan 111" Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 km² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangka Raya secara geografis terletak di antara 3 $^{\circ}$ 50' LS – 1 $^{\circ}$ 10' LU 110 $^{\circ}$ 20' – 116 $^{\circ}$ 0 BT dengan luas wilayah totalnya 157.983 km² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 km², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 km² dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 km².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketasengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

B. VISI DAN MISI

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung dan Modern"

MISI

- 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern.
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
- 3. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
- 4. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua /Wakil
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Ketua, Panitera, dan Sekretaris) setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat program kerja.

Program kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaanya berupa pelaporan serta pengawasan.

Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan program kerja yang ada pada rencana dan strategis (Renstra) sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (Job Description) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 2. Menindak lanjuti keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing Hakim menjadi Pengawas Bidang yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan No. W2.TUN6/755/K/PW.03.09/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Penyelesain Perkara pada tingkat Pertama maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan sejak diterimanya Gugatan.
- 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan baik yang diselengarakan oleh Mahkamah Agung maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementrian/Lembaga lainya.

- Turut serta melakukan pembaruan sistem peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana cetak biru (Blue Print) yang dibuat oleh Mahkamah Agung.
- 6. Berdasarkan amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dukungan Teknologi Informasi telah mempunyai Website dengan Home page: https://ptun-palangkaraya.go.id.
- 7. Sebagai perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Sejak tahun 2018 sampai sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang kemudian ditingkatkan kembali pada tahun 2019 dengan penerapan E-Court dan MIS (Monitoring Implementasi SIPP).

Dengan program kerja tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat di minimalisir, dan dengan terbentuknya Hakim Pengawas Bidang diharapkan dapat memperkuat pengawasan pelaksanaan program kerja dalam mencapai Visi dan Misi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

BABII

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara Masuk Pada Tahun 2020 : 34 Perkara

No.	NOMOR PERKARA	TANGG AL MASU K	TAN GGA L PUT US	PENGGUGAT/ PEMOHON	TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI, TERMOHON	KETERANGA N
1.	1/G/2020/PTUN.PLK	3-2- 2020	4-6- 2020	JAGORUSTAMAN	1. BUPATI KATINGAN	DESA
					2. BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN	
					4. Intervensi: SUNARDIE	
2.	2/G/2020/PTUN.PLK	6-2- 2020	11-6- 2020	ANOM	1. BUPATI KATINGAN	DESA
					2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KANTINGAN	

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

					HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019- 2025	
					3. KETUA BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA, DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN	
3.	3/G/2020/PTUN.PLK	17-2- 2020	2-6- 2020	MARDI ASIN	1. BUPATI KATINGAN 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	DESA
					3. Intervensi: HERDIYONO	
4.	4/G/2020/PTUN.PLK	18-2- 2020	24-6- 2020	NOOR SARI	1. BUPATI KATINGAN	DESA
					2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PENDA NANGE, KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019- 2025 3. Intervensi:	
					Netie	
5.	5/G/2020/PTUN.PLK	24-2- 2020	18-6- 2020	MUHAMAD RYAN RAHMADANI	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH	KEPEGAWAI AN
6.	6/G/2020/PTUN.PLK	24-2- 2020	10-6- 2020	TABUNG	1. BUPATI KATINGAN	DESA

					2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG JALA KECAMATAN PETAK MALAI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 3. KETUA BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA TUMBANG JALA KEC. PETAK	
					MALAI KAB. KATINGAN 4. Intervensi: WANSON, S.E	
7.	7/G/2020/PTUN.PLK	25-2- 2020	17-3- 2020 (Dica but)	MASTA	1. BUPATI KATINGAN	DESA
					2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUAI	
8.	8/G/2020/PTUN.PLK	26-3- 2020	27-3- 2020 (Dica but)	SUHANDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PERTANAHA N
9.	9/G/2020/PTUN.PLK	30-3- 2020	21-7-2020	TOMMY TANUWIDJAJA	1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	PERTANAHA N
					2. Intervensi: TRI DARTAHENA, SH.,M.Kn	
10.	10/G/2020/PTUN.PLK	9-4- 2020	16-7- 2020	WANCINO	1. BUPATI KATINGAN	DESA
					2. Intervensi: EMAN	

11.	1/P/FP/2020/PTUN.P LK	21-4- 2020	20-5- 2020	Pemohon: Drs. H. NURUL EDY, M.Si.	Termohon: LURAH PALANGKA	FIKTIF POSITIF
12.	11/G/2020/PTUN.PLK	29-4- 2020	1-9- 2020	SUHANDI	1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PERTANAHA N
					2. Intervensi: MUHAMMAD JAINURI	
13.	12/G/2020/PTUN.PLK	8-6- 2020	24-9- 2020	1.FAUZI KESUMA 2.ANDI SETYO MARGONO 3.NYAMIN	KEPALA DESA KAMPUNG BARU	DESA
					Intervensi: 1. MISRIYADI 2. Nonok Agus Harianto 3. Abdul Rohim	
14.	13/G/2020/PTUN.PLK	12-6- 2020	23-9- 2020	SINDUN	KEPALA DESA TURA	DESA
15.	14/G/2020/PTUN.PLK	12-6- 2020	23-9- 2020	MISTORI	KEPALA DESA TURA	DESA
16.	15/G/2020/PTUN.PLK	12-6- 2020	23-9- 2020	HENDRIYONO	KEPALA DESA TURA	DESA
17.	16/G/2020/PTUN.PLK	24-6- 2020	24-6- 2020 (Dica but)	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
18.	17/G/2020/PTUN.PLK	8-7- 2020	11- 11- 2020	PT PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR	PERIZINAN
19.	18/G/2020/PTUN.PLK	8-7- 2020	22- 10- 2020	RITA PERMATA SARI, S.Tr. Keb	BUPATI KATINGAN	KEPEGAWAI AN

20.	19/G/2020/PTUN.PLK	9-7- 2020	11- 11- 2020	PT PADANG MULIA (Diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR	PERIZINAN
					Intervensi: PT. ANUGERAH KREASI KARYA (Diwakili oleh MILO ADINUSO Sebagai Pimpinan Kantor Cabang)	
21.	20/G/2020/PTUN.PLK	9-7- 2020	26- 11- 2020	PT PADANG MULIA (Diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR	PERIZINAN
					Intervensi: PT. ANUGERAH KREASI KARYA (Diwakili oleh MILO ADINUSO Sebagai Pimpinan Kantor Cabang)	
22.	21/G/2020/PTUN.PLK	20-7- 2020	3-9- 2020	ARAB	KEPALA DESA GERAGU	DESA
23.	22/G/2020/PTUN.PLK	27-7- 2020	8-12- 2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
24.	23/G/KI/2020/PTUN. PLK	26-7- 2020	22- 10- 2020	NORLITA FEBRIANI	KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA	KIP
25.	24/G/2020/PTUN.PLK	7-11- 2020		1.Hiden 2.Dole 3.UHING 4.DEWI 5.RUSIANA 6.BAHING 7.UNYE SAPIA 8.INYOK 9.LUHING 10.RUSLIYA	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	LAIN-LAIN

26.	25/G/2020/PTUN.PLK	22-9- 2020	6-10- 2020 (Dica but)	MENGUMERI BIN HAMBRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
27.	26/G/2020/PTUN.PLK	22-9- 2020	6-10- 2020 (Dica but)	YUATI ALIAS AYU WULANDARI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
28.	27/G/2020/PTUN.PLK	8-10- 2020	-	MUNARI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
					Intervensi: DODDY WONGSO	
29.	28/G/2020/PTUN.PLK	3-11- 2020	-	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN	KEPEGAWAI AN
30.	29/G/2020/PTUN.PLK	6-11- 2020	8-12- 2020 (Dica but)	MEN GUMERI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
31.	30/G/2020/PTUN.PLK	12-11- 2020	8-12- 2020 (Dica but)	DEWAN PENGURUS WILAYAH GERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Di wakili oleh SAMSON S NYARANG selaku Ketua dan DASMAN B selaku Sekretaris)	WALIKOTA PALANGKARAYA	LAIN-LAIN
32.	2/P/FP/2020/PTUN.P LK	4-12- 2020	7-12- 2020 (Dica but)	Pemohon: YISLIA LILIS	Termohon: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU	FIKTIF POSITIF
33.	3/P/FP/2020/PTUN.P LK	4-12- 2020	7-12- 2020 (Dica but)	Pemohon: Andry kp Juni	Termohon: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU	FIKTIF POSITIF

34.	31/G/2020/PTUN.PLK	10-12- 2020	-	JHON KENEDY	1. BUPATI BARITO UTARA 2. CAMAT LAHEI, SELAKU KETUA PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN LAHEI TAHUN 2020	LAIN-LAIN
-----	--------------------	----------------	---	-------------	---	-----------

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara Banding yang diajukan pada Tahun 2020 : 24 perkara

		TAN	GGAL			
NO.	NOMOR PERKARA	PERMOHO NAN BANDING	PUTUSAN PT.TUN	PEMBANDING	TERBANDIN G	KETERANGA N
1.	22/G/2019/PTUN.P LK jo 112/B/2020/PT.TU N.JKT	23-1-2020	9-6-2020	PT. GAUNG ALAM SEMESTA (diwakili oleh YANTINDER VIR SINGH selaku Direktur Utama)	BUPATI KATINGAN	PERIZINAN
2.	24/G/2019/PTUN.P LK jo 113/B/2020/PT.TU N.JKT	23-1-2020	8-6-2020	NOOR YANIE DARHAMSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHA N KOTA PALANGKA RAYA	PERTANAHA N
3.	27/G/2019/PTUN.P LK jo 134/B/2020/PT.TU N.JKT	26-2-2020	17-6-2020	Drs. DAGUT, SH., MT	GUBERNUR KALIMANTA N TENGAH	KEPEGAWAIA N
4.	26/G/2019/PTUN.P LK jo 151/B/2020/PT.TU N.JKT	10-3-2020	1-7-2020	TATI, S.Pd	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA KEPALA DESA HURUNG KAMPIN KECAMATA N PASAK TALAWANG KABUPATEN KAPUAS	DESA
5.	29/G/2019/PTUN.P LK jo 189/B/2020/PT.TU N.JKT	21-4-2020	24-7-2020	ERDI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHA	PERTANAHA N

					N NASIONAL PROVINSI KALIMANTA N TENGAH	
6.	31/G/2019/PTUN.P LK jo 215/B/2020/PT.TU N.JKT	20-5-2020	19-10- 2020	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ARMAN MUIS	PERTANAHA N
7.	3/G/2020/PTUN.PL K jo 221/B/2020/PT.TU N.JKT	4-6-2020	26-10- 2020	MARDI ASIN	BUPATI KATINGAN	DESA
8.	1/G/2020/PTUN.PL K jo 230/B/2020/PT.TU N.JKT	12-6-2020	5-11-2020	Intervensi: SUNARDIE	JAGORUSTA MAN	DESA
9.	6/G/2020/PTUN.PL K jo 231/B/2020/PT.TU N.JKT	12-6-2020	13-10- 2020	Intervensi: WANSON, S.E	TABUNG	DESA
10.	5/G/2020/PTUN.PL K jo 240/B/2020/PT.TU N.JKT	29-6-2020	26-11- 2020	MUHAMAD RYAN RAHMADANI	KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA KALIMANTA N TENGAH	KEPEGAWAIA N
11.	4/G/2020/PTUN.PL K jo 244/B/2020/PT.TU N.JKT	3-7-2020	15-10- 2020	Intervensi: Netie	NOOR SARI	DESA
12.	30/G/2019/PTUN.P LK jo 252/B/2020/PT.TU N.JKT	6-7-2020	5-11-2020	Intervensi: DINNO ZULFIKAR WALUYAN	KEPALA KANTOR PERTANAHA N KABUPATEN KOTAWARI NGIN BARAT	PERTANAHA N

13.	10/G/2020/PTUN.P LK jo 261/B/2020/PT.TU N.JKT	27-7-2020	-	WANCINO	BUPATI KATINGAN	DESA
14.	9/G/2020/PTUN.PL K jo 260/B/2020/PT.TU N.JKT	28-7-2020	10-11- 2020	TOMMY TANUWIDJAJA	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHA N KABUPATEN KOTAWARI NGIN TIMUR	PERTANAHA N
15.	32/G/2019/PTUN.P LK jo 279/B/2020/PT.TU N.JKT	11-8-2020	-	1. ERWIN BARUS 2. SULAIMAN 3. KENJI JOSH PRINCE LEE 4. HORMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHA N BARITO TIMUR	PERTANAHA N
16.	11/G/2020/PTUN.P LK jo 303/B/2020/PT.TU N.JKT	10-9-2020	1=0	Intervensi: MUHAMMAD JAINURI	SUHANDI	PERTANAHA N
17.	13/G/2020/PTUN.P LK jo 322/B/2020/PT.TU N.JKT	28-9-2020	-	Tergugat: KEPALA DESA TURA	SINDUN	PERANGKAT DESA
18.	14/G/2020/PTUN.P LK jo 323/B/2020/PT.TU N.JKT	28-9-2020	-	Tergugat: KEPALA DESA TURA	MISTORI	PERANGKAT DESA
19.	15/G/2020/PTUN.P LK jo 324/B/2020/PT.TU N.JKT	28-9-2020	per	Tergugat: KEPALA DESA TURA	HENDRIYON O	PERANGKAT DESA
20.	12/G/2020/PTUN.P LK	5-10-2020	-	1. FAUZI KESUMA 2. ANDI SETYO MARGONO	BUPATI KATINGAN	PERANGKAT DESA
21.	18/G/2020/PTUN.P LK	5-11-2020		Tergugat: BUPATI KATINGAN	RITA PERMATA SARI, S.Tr. Keb	KEPEGAWAIA N

22.	17/G/2020/PTUN.P LK	25-11-2020	-	PT PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR	PERIZINAN
23.	19/G/2020/PTUN.P LK	25-11-2020	2 -	PT PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR	PERIZINAN
24.	20/G/2020/PTUN.P LK	2-12-2020		PT PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR	PERIZINAN

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2020: 17 perkara

	NOMOR	TANGG	AL	NOMOR	DF14	
NO.	PERKARA	PERMOHONAN KASASI	PUTUSAN KASASI	PERKARA KASASI	PEMOHON KASASI	N KASASI
1.	11/G/2019/PTUN .PLK jo. 302/B/2019/PT.T UN.JKT	3-1-2020	5-5-2020	206/K/TUN/2020	Drs. NADIE YENEPI	KEPALA KANTOR PERTANAH AN KABUPATE N PULANG PISAU
2.	19/G/2019/PTUN .PLK jo. 28/B/2020/PT.TU N.JKT	2-3-2020	ā	349/K/TUN/2020	PIRI AHADI	BUPATI SUKAMAR A
3.	20/G/2019/PTUN .PLK jo. 33/B/2020/PT.TU N.JKT	30-3-2020	-	359/K/TUN/2020	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAH AN KOTA PALANGKA RAYA
4.	16/G/2019/PTUN .PLK jo. 19/B/2020/PT.TU N.JKT	8-4-2020		372/K/TUN/2020	LELO ANGGORO, S.STP. MAP.	WALIKOTA PALANGKA RAYA
5.	18/G/2019/PTUN .PLK jo. 27/B/2020/PT.TU N.JKT	14-4-2020	-	393/K/TUN/2020	ANDI JAYANDI	BUPATI SUKAMAR A
6.	21/G/2019/PTUN .PLK jo. 72/B/2020/PT.TU N.JKT	8-6-2020	2	479/K/TUN/2020	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA
7.	24/G/2019/PTUN .PLK jo. 113/B/2020/PT.T UN.JKT	29-6-2020	-	528/K/TUN/2020	NOOR YANIE DARHAMSYA H	KEPALA KANTOR PERTANAH AN KOTA PALANGKA RAYA Intervensi: PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRI

8.							AN KEUANGA N REPUBLIK INDONESIA
9. 27/G/2019/PTUN .PLK jo. 134/B/2020/PT.T UN.JKT 3-7-2020 - 541/K/TUN/2020 Drs. DAGUT, SH., MT RK K/A RK Z. PA PE PE PA PE PE PA PE	8.	.PLK jo. 112/B/2020/PT.T	30-6-2020	-	521/K/TUN/2020	ALAM SEMESTA (diwakili oleh YANTINDER VIR SINGH selaku Direktur	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATE N KATINGAN
10. 26/G/2019/PTUN .PLK jo. 151/B/2020/PT.T UN.JKT 5-8-2020 - TATI, S.Pd DE (P) DE HL KA INT AS 11. 6/G/2020/PTUN. PLK jo. 231/B/2020/PT.T UN.JKT 26-10-2020 - TABUNG TU JAL KEG AN	9.	.PLK jo. 134/B/2020/PT.T	3-7-2020	-	541/K/TUN/2020	N1 52 1	GUBERNU
11. 6/G/2020/PTUN. PLK jo. 231/B/2020/PT.T UN.JKT 26-10-2020 - TABUNG TU JAL KEG AN	10.	.PLK jo. 151/B/2020/PT.T	5-8-2020	-	-	TATI, S.Pd	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHA N KEPALA DESA (PILKADES) DESA HURUNG KAMPIN Intervensi: ASON
KAI	11.	PLK jo. 231/B/2020/PT.T	26-10-2020	-	-	TABUNG	1. BUPATI KATINGAN 2. KETUA PANITIA PEMILIHA N KEPALA DESA TUMBANG JALA KECAMAT AN PETAK MALAI KABUPATE

						TAHUN 2019 3. KETUA BADAN PERMUSYA WARATAN DESA TUMBANG JALA KEC. PETAK MALAI KAB. KATINGAN Intervensi: WANSON, S.E
12.	23/G/KI/2020/PT UN.PLK	2-11-2020	٠	E	NORLITA FEBRIANI	KEPOLISIA N RESOR KOTA PALANGKA RAYA
13.	3/G/2020/PTUN. PLK jo. 221/B/2020/PT.T UN.JKT	5-11-2020	-	-	Intervensi: HERDIYONO	MARDI ASIN
14.	4/G/2020/PTUN. PLK jo. 244/B/2020/PT.T UN.JKT	6-11-2020	-	<u>-</u>	NOOR SARI	1. BUPATI KATINGAN 2. PANITIA PEMILIHA N KEPALA DESA, DESA PENDA NANGE, KECAMAT AN BUKIT RAYA KABUPATE N KATINGAN TAHUN 2019-2025 Intervensi: NETIE

15.	31/G/2019/PTUN .PLK jo. 215/B/2020/PT.T UN.JKT	12-11-2020	-	-	ARMAN MUIS, S.H., S.IK.	KEPALA KANTOR PERTANAH AN KOTA PALANGKA RAYA Intervensi: PEMERINT AH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
16.	9/G/2020/PTUN. PLK jo. 260/B/2020/PT.T UN.JKT	26-11-2020	-	13 - 0	Intervensi: TRI DARTAHENA, SH.,M.Kn	TOMMY TANUWIDJ AJA
17.	1/G/2020/PTUN. PLK jo. 230/B/2020/PT.T UN.JKT	14-12-2020	-	-	JAGORUSTA MAN	1. BUPATI KATINGAN 2. BADAN PERMUSYA WARATAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMAT AN KATINGAN HULU KABUPATE N KATINGAN 3. PANITIA PEMILIHA N KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMAT AN KATINGAN HULU KABUPATE N KATINGAN HULU KABUPATE N KATINGAN KECAMAT AN KATINGAN HULU KABUPATE N

	KATINGAN Intervensi: SUNARDIE

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara PK yang diajukan pada tahun 2020 : 2 perkara

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI	NOMOR PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	KETERAN GAN
1.	31/G/2017/PTUN. PLK jo 105/B/2018/PT.T UN.JKT	20-2-2020	BUPATI BARITO TIMUR	FRISBOY	117 PK/TUN/2020	LAIN-LAIN
2.	1/P/FP/2020/PTU N.PLK	8-6-2020	Drs. H. NURUL EDY, M.Si.	LURAH PALANGKA	159 PK/TUN/2020	FIKTIF POSITIF

Keadaan perkara tingkat Eksekusi : NIHIL

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI	KETERANGAN
			NIHIL		

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang diputus (Perkara Tahun 2019): 14 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	22/G/2019/PTUN.PLK (PERIJINAN)	05-09-2019	09-01-2020	PT. GAUNG ALAM SEMESTA (diwakili oleh Yantinder Vir Singh selaku Direktur Utama)	BUPATI KEPALA DAERAH TK. II KABUPATEN KATINGAN
02	24/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-09-2019	14-01-2020	NOOR YANIE DARHAMSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA P.RAYA Intervensi: Pemerintah RI Cq. Kementrian Keuangan RI
03	26/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	13-11-2019	26-02-2020	TATI, S.Pd	- BUPATI KAPUAS - KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA HURUNG KAMPIN Intervensi: Ason
04	27/G/2019/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-11-2019	19-02-2020	Drs. DAGUT, SH., MT	GUBERNUR KALTENG
05	28/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	22-11-2019	18-02-2020	H. MAHLIAN	- BUPATI BARITO SELATAN - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS
06	29/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-12-2019	14-04-2020	ERDI	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. KALIMANTAN TENGAH

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
07	30/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-12-2019	14-04-2020	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (diwakili oleh Ir. Binsar Manurung selaku Presiden Direktur	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT Intervensi: Dinno Zulfikar Waluyan
08	31/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	19-12-2019	12-05-2020	ARMAN MUIS, SH., S.IK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA Intervensi: PEMKO P.RAYA diwakili oleh Walikota P.Raya bernama Fairid Naparin)
09	32/G/2019/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-12-2019	28-07-2020	ERWIN BARUS SULAEMAN KENJI JOSH PRINCEN LEE HORMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BARITO TIMUR Intervensi: PT. PERTAMINA (PERSERO)
10	33/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	23-12-2019	13-01-2020 (DICABUT)	NOOR SARI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PENDA NANGE, KEC. BUKIT RAYA KAB. KATINGAN (TAHUN 2019-2025)
11	34/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	23-12-2019	14-01-2020 (DICABUT)	MASTA	- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUAI - BADAN PERMUSYYA WARATAN DESA TUMBANG KUAI
12	35/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	26-12-2019	16-01-2020 (DICABUT)	- MENTENG - ERI KUSRINIE - JAGO RUSTAMAN - RUSLI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KEC. KATINGAN HULU, KAB. KATINGAN
13	36/G/2019/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-12-2019	28-01-2020 (DICABUT)	WANCINO	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PETAK BAHANDANG, KEC. TASIK PAYAWAN, KAB. KATINGAN
14	37/G/2019/PTUN.PLK	31-12-2019	14-01-2020 (DICABUT)	ANOM	PANITIA PEMILIHAN KEPALA PENETAPAN CALON KEPALA DESA HAMPALIT, KEC. KATINGAN HILIR, KAB. KATINGAN

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu : 30 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	1/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	3-2-2020	4-6-2020	JAGORUSTAMAN	- BUPATI KATINGAN - BADAN PERMUSAWARAT AN DESA, DESA RANTAU PUKA KEC KATINGAN HULU KAB. KATINGAN - PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KEC. KATINGAN HULU, KAB. KATINGAN Intervensi: Sunardie
02	2/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	6-2-2020	11-6-2020	ANOM	- BUPATI KATINGAN - KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KEC. KATINGAN HILIR, KAB. KATIMNGAN (TAHUN 2019- 2025)
03	3/G/2019/PTUN.PLK (DESA)	17-2-2020	2-6-2020	MARDI ASIN	BUPATI KATINGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DEHES Intervensi: Herdiyono
04	4/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	18-2-2-2020	24-6-2020	NOOR SARI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PENDA NANGE, KEC. BUKIT RAYA KAB. KATINGAN (TAHUN 2019-2025) Intervensi: Netie

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
05	5/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	24-2-2020	18-06-2020	MUHAMAD RYAN RAHMADANI	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
06	6/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	24-2-2020	10-6-2020	TABUNG	BUPATI KATINGAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG JALA KEC. PETAK MALAI, KAB. KATINGAN TAHUN 2019
07	7/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	25-2-2020	17-3-2020 (DICABUT)	MASTA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG KUAI
08	8/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	26-3-2020	27-3-2020 (DICABUT)	SUHANDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARIGIN BARAT
09	9/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	30-3-2020	21-7-2020	TOMMY TANUWIDJAJA	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KOTIM Intervensi : Tri
10	10/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	9-4-2020	16-7-2020	WANCINO	Dartahena, SH., M.Kn BUPATI KATINGAN Intervensi : Eman
11	1/P/FP/2020/PTUN.PLK (FIKTIF POSITIF)	21-4-2020	20-5-2020	Drs. H. NURUL EDY, M.Si	LURAH PALANGKA
12	11/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	29-4-2020	1-9-2020	SUHANDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTIM Intervensi : Muhammad Jainuri

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
13	12/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	8-6-2020	24-9-2020	FAUZI KUSUMA ANDI SETYO MARGONO NYAMIN	KEPALA DESA KAMPUNG BARU Intervensi : Misriyadi Nonok Agus Harianto
14	13/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-6-2020	23-9-2020	SINDUN	Abdul Rohim KEPALA DESA TURA
15	14/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-6-2020	23-9-2020	MISTORI	KEPALA DESA TURA
16	15/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	12-6-2020	23-9-2020	HENDRIYONO	KEPALA DESA TURA
17	16/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	24-6-2020	24-6-2020 (DICABUT)	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA P.RAYA
18	17/G/2020/PTUN.PLK (PERIJINAN)	8-7-2020	11-11-2020	PT. PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexsander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR
19	18/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	8-7-2020	22-10-2020	RITA PERMATA SARI, S.Tr. Keb	BUPATI KATINGAN
20	19/G/2020/PTUN.PLK (PERIJINAN)	9-7-2020	11-11-2020	PT. PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexsander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR Intervensi: PT. Anugerah Kreasi Karya (diwakili oleh Milo Adinuso sebagai Pimpinan Kantor Cabang)
21	20/G/2020/PTUN.PLK (PERIJINAN)	9-7-2020	26-11-2020	PT. PADANG MULIA (diwakili oleh Antonius Alexsander Krustiantoro selaku Direktur Utama)	BUPATI BARITO TIMUR Intervensi: PT. Anugerah Kreasi Karya (diwakili oleh Milo Adinuso sebagai Pimpinan Kantor Cabang)

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
22	21/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	20-7-2020	3-9-2020	ARAB	KEPALA DESA GERAGU
23	22/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	27-7-2020	8-12-2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA P.RAYA
24	23/G/KI//2020/PTUN.PLK (KIP)	26-7—2020	22-10-2020	NORLITA FEBRIANI	KEPOLISIAN RESORT KOTA PALANGKA RAYA
25	25/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-9-2020	6-10-2020 (DICABUT)	MENGUMERI BIN HAMBRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
26	26/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-9-2020	6-10-2020 (DICABUT)	YUATI ALIAS AYU WULANDARI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
27	29/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	6-11-2020	8-12-2020 (DICABUT)	MEN GUMERI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
28	30/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	12-11-2020	8-12-2020 (DICABUT)	DEWAN PENGURUS WIL. GERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN PROP. KAL-TENG (diwakili oleh Samson S. Nyarang selaku Ketua dan Dasman B selaku Sekretaris)	WALIKOTA PALANGKARAYA
9	2/P/FP/2020/PTUN.PLK (FIKTIF POSITIF)	4-12-2020	7-12-2020 (DICABUT)	YISLIA LILIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
0	3/P/FP/2020/PTUN.PLK (FIKTIF POSITIF)	4-12-2020	7-12-2020 (DICABUT)	ANDRY kp JUNI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2020 : 4 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	2/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	11-6-2020	ANOM	BUPATI KATINGAN KETUA PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KEC. KATINGAN HILIR KAB. KATINGAN TAHUN 2019- 2025
				KETUA BADAN PERMUSAWARATAN DESA, DESA HAMPALIT KEC. KATINGAN HILIR, KAB. KATINGAN
02	3/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	2-6-2020	MARDI ASIN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DEHES
03	21/G/2020/PTUN.PLK (DESA)	3-9-2020	ARAB	Intervensi: Herdiyono KEPALA DESA GERAGU
04	22/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	8-12-2020	TUTIK LASMININGSIH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Tahun 2020 : 4 perkara

NO	NO PERKARA	TANGGAL PUTUS		PENGGUGAT/	TERGUGAT/	
	PERIHAL	PTUN	PTTUN JKT	PEMOHON	TERMOHON	
01	20/G/2020/PTUN.PLK jo 33/B/2020/PT.TUN. JKT (PERTANAHAN)	/2020/PT.TUN. 13-11-2019 09-03-2020		MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	
02	29/G/2019/PTUN.PLK jo 189/B/2020/PT.TUN. JKT (PERTANAHAN)	14-04-2020 24-08-2020 ERDI KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIO PROP. KAL-TENG	4-04-2020 24-08-2020 ERDI WILAYA PERTAN	WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL		
03	30/G/2019/PTUN.PLK jo 252/B/2020/PT.TUN.J KT (PERTANAHAN)	22-06-2020	05-11-2020	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (diwakili oleh Ir. Binsar Manurung selaku Presiden Direktur)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Intervensi: Dinno Zulfikar Waluyan	
04	5/G/2020/PTUN.PLK jo 240 /B/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	18-06-2020	26-11-2020	MUHAMMAD RYAN RAHMADANI	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH	

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2020 : NIHIL

- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POSBAKUM

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tahun Anggaran 2020 pagu anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.800.000,- selama 1 Tahun melalui Kegiatan Pos Bantuan Hukum untuk ATK Posyankum sebesar Rp. 3.000.000,- dan Jasa Konsultan Hukum sebesar Rp. 28.800.000,- dan Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 31.800.000,- atau 100,00% dari pagu. Untuk Jasa Konsultan Hukum menggunakan Jasa Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum.

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

3. PERKARA PRODEO

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tahun Anggaran 2020 pagu anggaran untuk Perkara Prodeo sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 3 Perkara melalui Kegiatan Penyelesaian Perkara Prodeo untuk Biaya Perkara Prodeo. Realisasi

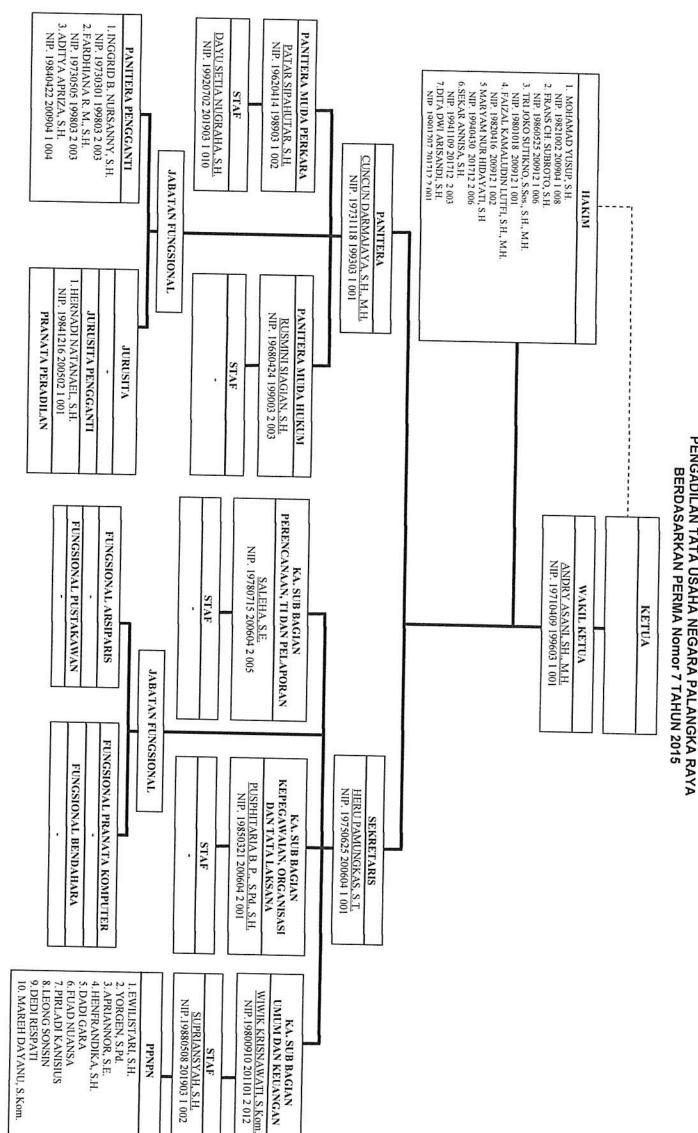
anggaran ini sebesar Rp. 0,- atau 0% dari pagu. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang didaftarkan sehingga anggaran yang ada tidak dipakai.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H	Ketua	Mutasi Ke PTUN
2	Andry Asani, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Semarang
3	Mohamad Yusup, S.H.	Hakim	
4	Frans C.H Subroto, S.H.	Hakim	
5	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	Hakim	
6	Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.	Hakim	
7	Maryam Nur Hidayati, S.H.	Hakim	
8	Sekar Annisa, S.H.	Hakim	-
9	Dita Dwi Arisandi, S.H	Hakim	
10	Cuncun Darmajaya, S.H.	Panitera	
11	Patar Sipahutar, S.H	Panitera Muda Perkara	
12	Rusmini Siagian, S.H	Panitera Muda Hukum	
13	Inggrid Bintang Nursanny,S.H	Panitera Pengganti	
14	Fardhiana Resdhianti Muldijaningrum.S.H	Panitera Pengganti	
15	Aditya Apriza,S.H	Panitera Pengganti	
16	Hernadi Natanael, S.H	Juru Sita Pengganti	
17	Anditiawarman Basrul, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum	
10		10 NO. STATE OF THE STATE OF TH	Mutasi Ke PTUN Pekanbaru
18	Dayu Setia Nugraha, S.H.	Analis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Perkara	
19	Heru Pamungkas, S.T.	Sekretaris	
20	Saleha, S.E	Kasub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
21	Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H	Kasub Bag. Kep., Organisasi, dan Tata Laksana	
22	Wiwik Krisnawati. S.Kom	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	
23	Supriansyah, S.H	Penyusun Laporan Keuangan/Staf Umum dan Keuangan	
24	Ewilistari,S.H	PPNPN / Pramubhakti	
25	Yorgen, S.Pd	PPNPN / Satpam	
26	Henfrandika, S.H	PPNPN / Satpam	
27	Apriannor, S.E	PPNPN / Pramubhakti	
28	Dadi Gara	PPNPN / Supir	
29	Fuad Nuansa	PPNPN / Satpam	
30	Pirladi Kanisius	PPNPN / Satpam	
31	Leong Sonsin	PPNPN / Pramubhakti	
32	Dedi Respati	PPNPN / Pramubhakti	
33	Mareh Dayanu, S.Kom	PPNPN / Supir	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA BERDASARKAN PERMA Nomor 7 TAHUN 2015 STRUKTUR ORGANISASI



	TENAGA TEKNIS HAKIM				
1	Sono Cook	Nama NIP Pangkat/Golongan	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ANDRY ASANI, S.H., M.H 19710409 199603 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	
2	9	Jabatan Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda MOHAMAD YUSUP, S.H. 19821002 200904 1 008 Penata (III/c) Hakim Pratama Madya	
3		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :	FRANS C.H SUBROTO, S.H. 19860525 200912 1006 Penata (III/c) Hakim Pratama Madya	
4	9	Nama NIP Pangkat/Golongan	: :: ::	TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. 19801018 200912 1001 Penata (III/c)	
5		lahatan Nama NIP Pangkat/Golongan	: : :	Hakim Pratama Madya FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., M.H. 19820416 200912 1 002 Penata (III/c)	
	a	Nama NIP Pangkat/Golongan	: : : :	Hakim Pratama Madya MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. 19940430 201712 2 006 Penata Muda (III/a)	
	9	Iabatan Nama NIP Pangkat/Golongan	: : : : : :	Hakim Pratama SEKAR ANNISA, S.H. 19941109 201712 2 003 Penata Muda (III/a)	
6		Iabatan Nama NIP Pangkat/Golongan Iabatan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Hakim Pratama DITA DWI ARISANDI, S.H 19901207 201712 2 001 Penata Muda (III/a) Hakim Pratama	

		TENAGA TE	KN	IS KEPANITERAAN
		Nama NIP	:	CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.
1		5000	1:	
		Pangkat/Golongan	1	
		Jabatan	╢:	
		Nama]:	PATAR SIPAHUTAR, S.H.
3	19	NIP	1:	19620414 198903 1 002
		Pangkat/Golongan	1:	Penata TK I (III/d)
		Jabatan	:	Panitera Muda Perkara
	63	Nama	:	RUSMINI SIAGIAN, S.H.
4		NIP	:	19680424 199003 2 003
		Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
	1	Jabatan	:	Panitera Muda Hukum
	(Nama	:	INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
5		NIP	:	19730301 199803 2 003
		Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
		Jabatan	:	Panitera Pengganti
		Nama	:	FARDHIANA RESDHIANTI MUDIJANINGRUM, S.H.
6		NIP	:	19730505 199803 2 003
	AS .	Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
	N. F.	Jabatan	:	Panitera Pengganti
		Nama	:	ADITYA APRIZA, S.H.
7	9	NIP	:	19840422 200904 1 004
		Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)
	图例	Jabatan	:	Panitera Pengganti
	0	Nama	:	HERNADI NATANAEL, S.H.
8	(I)	NIP	:	19841216 200502 1001
		Pangkat/Golongan		Penata (III/c)
		Jabatan		Juru Sita Pengganti/Bendahara Penerima

		TENAGA NON TEK	VIS	PEJABAT STRUKTURAL
1	8	Nama NIP Pangkat/Golongan	:	HERU PAMUNGKAS, S.T 19750625 200604 1 001 Pembina (IV/a)
2		Jabatan Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :	SALEHA, S.E 19780715 200604 2 005 Penata TK. I (III/d) Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
3		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan		PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.I 19850321 200604 2 001 Penata (III/c) Kasub Bag.Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
4	B	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom 19800910 201101 2 012 Penata (III/c) Kasub Bag. Umum dan Keuangan

	TENAGA NON TEKNIS STAF				
1	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	SUPRIANSYAH, S.H 19880808 201903 1 002 Penata Muda (III/a) Penyusun Laporan Keuangan			
2	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	DAYU SETIA NUGRAHA, S.H 19920702 201903 1 010 Penata Muda (III/a) Analis Perkara Peradila			

		ERING FFINE	N (PEGAWAI	PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI)
١.	2	Nama	:	EWILISTARI, S.H
1		Jabatan	:	Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
		Nama	:	YORGEN, S.Pd
2		Jabatan	•	Pramubakti / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
3		Nama	:	HENFRANDIKA, S.H
	Carpon Contraction of the Contra	Jabatan	:	Satpam / diperbantukan di Bagian
_	102 101			Kepaniteraan Hukum
	65	Nama	:	APRIANNOR, S.E
4	TY T	Jabatan	:	Pramubakti/ diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Perkara
		Nama	:	DADY GARA
5		Jabatan	:	Supir/ diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan/PTSP
		Nama		FUAD NUANSA
6		Jabatan	į.	Satpam malam
		Nama	:	PIRLADI KANISIUS
7		Jabatan		Satpam malam
1222		Nama	: 8	LEONG SONSIN
8	THE WAY	Jabatan		Pramubakti / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
		Nama	:	DEDI RESPATI
9	The same	Jabatan	: 1	Pramubakti/ diperbantukan di Umum dan Keuangan/PTSP
		Nama	: 1	MAREH DAYANU, S.Kom.
10		Jabatan	: <u>\$</u>	Supir / diperbantukan di Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

1. Mutasi

Pada Tahun 2020 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terdapat Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk :

 Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: 1218/DjMT/KEP/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Keluar

 YUSRAN IBERAHIM, S.H NIP. 19640914 199103 1 005 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi pada tanggal 22 Januari 2020 sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Mutasi Masuk

- CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19731118 199303 1 001
 Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan Pelantikan tanggal 4 Februari 2020 sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47 / KMA /SK/ III / 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Keluar

terdiri atas Ketua dan 3 (tiga) orang Hakim

- I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H. NIP. 19701030 199403 1 001 Hakim Madya Utama/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 4 Juni 2020 sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
- 2) RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn NIP. 19790416 200904 1 001 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 26 Juni 2020 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

- MISBAH HILMY, S.H. NIP. 19850602 200912 1 006 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 23 Juni 2020 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- 4) FENI ENGGARWATI, S.H. NIP. 19861209 200912 2 003 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 26 Juni 2020 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Mutasi Masuk terdiri atas Ketua. Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang Hakim

- OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. NIP. 19721026 199203 2 001 Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin TMT Jabatan tanggal 11 Juni 2020 sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 2) ANDRY ASANI, S.H., M.H. NIP. 19710409 199603 1 001 Hakim Madya Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Serang TMT Jabatan tanggal 25 Juni 2020 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- MOHAMAD YUSUP, S.H. NIP. 19821002 200904 1 008 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TMT Jabatan tanggal 4 Juni 2020 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- 4) TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. NIP. 19801018 200912 1 001 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu TMT Jabatan tanggal 1 Juli 2020 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 5) FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. NIP. 19820416 200912 1 002 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari TMT Jabatan tanggal 16 Juli 2020 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

 Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 373/DjMT/KEP/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Masuk Calon Hakim di Lantik menjadi Hakim :

- MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006 Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Pelantikan tanggal 4 Mei 2020 sebagai Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006 Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pelantikan tanggal 4 Mei 2020 sebagai Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- DITA DWI ARISANDI, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006 Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Pelantikan tanggal 2 Juni 2020 sebagai Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 584/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit TNI pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Keluar

- ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H. NIP. 19711010 199103 1 003
 Pengadministrasi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi pada tanggal 18 September 2020 sebagai Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 256/KMA/SK/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, wakil Ketua, Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Keluar

 OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. NIP. 19721026 199203 2 001 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi pada tanggal 12 November 2020 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. Promosi

Tidak terdapat Promosi Jabatan Struktural/Fungsional pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

3. Pensiun

Tidak terdapat Hakim dan Pejabat Struktural/Fungsional yang Pensiun pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

- Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
 05/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pengangkatan
 Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut:
 - SUPRIANSYAH, S.H. NIP. 19880508 201903 1 002 Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Pelantikan tanggal 13 April 2020.
 - DAYU SETIA NUGRAHA, S.H. NIP. 19920702 201903 1 010 Jabatan Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Pelantikan tanggal 13 April 2020.

4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM Teknis/ Non Teknis

Terdapat 6 (enam) orang Hakim dan 6 (enam) orang Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Teknis / Non Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:

No	. Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
1.	Wiwik Krisnawati, S.Kom.	W2-TUN6/118/KP.10.09/I/2020 Tanggal 07 Januari 2020	Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Semester II Unaudited T.A. 2019
2.	Cuncun Darmajaya, S.H., M.H.	W2-TUN6/285/KP.10.09/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020	Bimtek Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Salinan/Penetapan Elektronik
3.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN7/804/KP.10.09/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020	Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Semester I T.A. 2020
4.	Wiwik Krisnawati, S.Kom.	W2-TUN7/804/KP.10.09/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020	Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Semester I T.A. 2020
5.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN6/916/KP.10.09/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020	Pelatihan Online dari tempat tugas English Effective Presentation Gelombang III Tahap II
6.	Frans CH. Subroto, S.H.	W2-TUN6/917/KP.10.09/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020	Pelatihan Online dari tempat tugas English Effective Presentation Gelombang III Tahap II
7.	Maryam Nur Hidayati, S.H	W2-TUN6/918/KP.10.09/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020	Pelatihan Online dari tempat tugas English Effective Presentation Gelombang III Tahap II
8.	Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.	W2-TUN6/959/KP.10.09/VIII/2020 Tanggal 06 Agustus 2020	Pelatihan Teknis Funsional Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Peradilan TUN Mengadili Perbuatan Hukum Oleh Penguasa Seluruh Indonesia Tahap II

No	. Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
9.	Dayu Setia Nugraha, S.H.	W2-TUN6/1021/KP.10.09/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020	Bimtek Penanganan Perkar Secara Elektronik (E-Court) dan Penyusunan Berkas Bundel A dan Bundel B
10.	3.0.000, 5.11.	W2-TUN7/1107/KP.10.09/IX/2020 Tanggal 22 September 2020	Pelatihan Teknis Fungsiona Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Permohonan Fiktif Positif bagi Hakim Peradilar TUN
11.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	Tanggal 22 September 2020	Pelatihan Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Permohonan Fiktif Positif bagi Hakim Peradilan TUN
12.	Hernadi Natanael, S.H.	W2-TUN6/1133/KP.10.09/IX/2020 Tanggal 22 September 2020	Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan TUN
13.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN6/1141/KP.10.09/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020	Pelatihan Online Preparation For The Toefl dari tempat tugas
14.		W2-TUN6/1137/KP.10.09/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020	Pelatihan Online Bekerja Dengan Media (Siaran Pers) Bath 1
		W2-TUN6/1168/KP.10.09/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020	Pelatihan Online Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Permohonan Fiktif Positif bagi Hakim
		W2-TUN6/1169/КР.10.09/X/2020 Гаnggal 14 Oktober 2020	Pelatihan Online Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Permohonan Fiktif Positif bagi Hakim
7.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN6/1203/KP.10.09/X/2020 Fanggal 23 Oktober 2020	Pelatihan Online Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Permohonan Fiktif Positif Gelombang 3 bagi Hakim

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
18.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN6/1204/KP.10.09/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020	Pelatihan Online Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Permohonan Fiktif Positif Gelombang 3 bagi Hakim
19.	Inggrid Bintang Nursanny, S.H.	W2-TUN6/1230/KP.10.09/XI/2020 Tanggal 04 November 2020	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan TUN
20.	Cuncun Darmajaya, S.H., M.H.	W2-TUN7/1269/KP.10.09/XI/2020 Tanggal 16 November 2020	Bintek Penilaian Kinerja Pegawai dan Sosialisasi WBK dan WBBM Sewilayah Hukum PT.TUN Jakarta
21.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN7/1269/KP.10.09/XI/2020 Tanggal 16 November 2020	Bintek Penilaian Kinerja Pegawai dan Sosialisasi WBK dan WBBM Sewilayah Hukum PT.TUN Jakarta

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 seperti:

- 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tanggal 12

 Nopember 2019 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2020 No. DIPA005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Nopember 2019;
- 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 65/PA/SK/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Desember 2020 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01).
 - Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan:
 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran:
 - Gaji dan Tunjangan (1066.994.001)
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002)
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02). Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran:
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1071.951.052)
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09). Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan:
 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
 - Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

- Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (1059.001.051).
- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikam Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (1059.002.051)
- Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (1059.003.051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA BUA Tahun 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tanggal 12 Desember 2018 dengan nilai pagu awal Rp. 4.026.797.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 8 kali, Sedangkan untuk DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Nopember 2019 dengan nilai pagu Rp. 38.300.000,- mengalami revisi anggaran sebanyak 1 kali.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 tanggal 12 Nopember 2019 sampai pada Revisi ke-8 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2019 tanggal 12 Nopember 2019 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut:

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.617.897.000.
 - Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan:
 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (1066.994) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (1066.994.001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.408.253.000,-.
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.994.002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.184.644.000,-

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran:
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1071.951.052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 25.000.000,-.
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 38.300.000,-.
 - Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :
 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
 - Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan
 Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran
 :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (1059.001.051) dengan pagu
 DIPA sebesar Rp. 3.500.000,-.
 - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikam Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (1059.002.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (1059.003.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 31.800.000,-.

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

- 1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/ Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
- 2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari hari kantor seperti Belanja Keperluaan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
- 3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja
 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan
 Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja
 Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2020 No. DIPA-005.01.2.578843/2020 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tanggal 12 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 21 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 revisi ke 8 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.408.253.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2019 telah menyerap dana sebesar Rp. 3.381.764.442,- dan Pengembalian sebesar Rp. 925.000,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 27.413.558,- atau sebesar 99,22% dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.184.644.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2020 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar Rp. 1.182.528.698,- dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 2.115.302,- atau sebesar 98,82% dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri:

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 625.998.468,-atau 99,91%
 yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 534.591.468,- atau 99,94% dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 5.986.000,- atau
 99,77% dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 40.680.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 29.027.000,- atau 99,28% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Penangan Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 15.714.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 62.065.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar
 62.065.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Rp.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 92.134.802,- atau 99,41% terdiri dari belanja:
 - Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 68.341.513,- atau 99,78% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 593.289,- atau 59,57% dari pagu DIPA.
 - Belanja Sewa Rumah Hakim sebesar Rp. 21.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp. 1.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 378.134.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja:
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp.
 194.388.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar
 Rp. 42.892.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp.
 140.854.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 24.196.428,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.300.000,-, realisasi anggaran Rp. 31.800.000,- atau 83,03% dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena Belanja Pengamanan Sidang tidak

ada digunakan dan Belanja penanganan perkara prodeo tidak ada digunakan karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran belanja modal dengan realisasi Rp. 25.000.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2020 PER 30 DESEMBER 2020 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	3.408.253.000,-	3.381.764.442,-	(26.488.558,-)	99,22
2.	Bel. Barang (01)	1.184.644.000,-	1.182.528.698,-	(2.115.302,-)	99,82
	Bel. Barang (05)	38.300.000,-	31.800.000,-	(6.500.000,-)	83,03
3.	Bel. Modal (01)	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-	100,00
	Jumlah Belanja	4.656.197.000,-	4.621.093.140,-	(35.103.860,-)	99,25

DAFTAR REALISASI PNBP 2 DIPA PER 30 DESEMBER TAHUN 2020 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	17.107.000,-	16.101.243,-	(1.005.757,-)	94,12
2.	DIPA 05	6.696.000,-	15.166.500,-	8.470.500,-	226,50
	Jumlah	23.803.000,-	31.267.743,-	7.464.743,-	131,36

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksana tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksana pekerjaan antara lain adalah :

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 1.029 M².
- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan Ketua dan Wakil
 Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).
- 3 buah Mobil Dinas yang terdiri dari 3 Mobil Dinas semuanya milik Pengadilan Tata
 Usaha Negara.
- 9 buah Sepada Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
 Raya

a). Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2020 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tanggal 12 Nopember 2019 sampai revisi 8 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi

Rp. 25.000.000;

Rp. 294.896.000;

b). Pemeliharaan.

-	Gedung-Bangunan dan Halaman dan Rumah Dinas	Rp.	227.082.000;
-	Kendaraan Roda 4	Rp.	85.704.000;
23 5 23	Kendaraan Roda 2	Rp.	32.400.000;
1.7	Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	22.750.000;
-	Langganan Daya Dan Jasa	Rp.	294.896.000

c). Penghapusan

Penghapusan untuk Tahun 2020 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak ada mengusulkan penghapusan.

I. Daftar Inventaris Per 30 Desember 2020 Berupa :

Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibangun berdasarkan DIP Nomor: 063/XIII/3/-/1995, tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp. 443.200.000,- dan dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

II. Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

Ruang Ketua

Ukuran =
$$9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$$

Jumlah Hakim = 1 Orang

Ruang Wakil Ketua

Ukuran =
$$9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Hakim = - Orang

Ruang Hakim

Ukuran =
$$13.5 \times 6 = 81 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Hakim = 4 Orang

- Ruang Panitera

Ukuran =
$$3.5 \times 6.4 = 22.4 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = 1 Orang

Ruang Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ukuran =
$$4.5 \times 5 = 22.5 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = 1 Orang

- Ruang Server

Ukuran =
$$4.5 \times 5 = 22.5 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = - Orang

- Ruang Panmud Perkara

Ukuran =
$$67.5 \times 6 = 40.5 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = 5 Orang

Ruang Panmud Hukum

Ukuran =
$$6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = 2 Orang

Ruang Kepegawaian

Ukuran =
$$6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = 1 Orang

- Ruang Umum dan Keuangan

Ukuran =
$$6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = 2 Orang

Ruang Berkas Perkara

Ukuran =
$$5,89 \times 3,88 = 22,8 \text{ M}^2$$
.

Jumlah Pegawai = - Orang

Tenaga Honorer

Jumlah Pegawai = 10 Orang

- Ruang Pemeriksaan Persiapan

Ukuran = $14 \times 6 = 84 \text{ M}^2$.

- Ruang Sidang Utama

Ukuran =
$$15 \times 10 = 150 \text{ M}^2$$
.

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 443.200.000,-

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 206.700.000,-

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor : 085/XIII/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp. 221.464.000,-;

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berdasarkan anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2020, telah dilakukan pengadaan sebagai berikut:

a). Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2020 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2020 Tanggal 12 Nopember 2018 sampai revisi 8 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi

Rp. 25.000.000;

b). Pemeliharaan

 Gedung-Bangunan dan Halaman dan Rumah Dinas

Rp. 227.082.000;

- Kendaraan Roda 4

Rp. 85.704.000;

	Laporar	Tahunan	2020
Kendaraan Roda 2	Rp.	32.400.00	00;
Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	22.750.00	0;

77	Langganan Daya Dan Jasa	Rp.	294.896.000;

c). Penghapusan

Penghapusan untuk tahun 2020 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak ada mengusulkan penghapusan yang ditujukan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Implementasi E-Court di PTUN Palangka Raya

Pada Tahun 2018 merupakan momentum peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Pada tanggal 10 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Secara Elektronik di pengadilan. Peraturan tersebut terkait sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara peradilan/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan system elektonik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Administrasi perkara secara elektronik atau yang disebut *E-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Perkara secara online (E-Filling).
- b. Pembayaran biaya perkara secara online (E-Payment).
- Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban).
- d. Pemanggilan online (E-Summon).
- e. Penyampaian salinan putusan secara online.

Manfaat penggunaan aplikasi e-court dalam pendaftaran perkara secara online adalah sebagai berikut :

- 1. Mampu menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- Pembayaran panjar biaya dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
- 3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi/media
- Proses temu kembali data dengan lebih cepat.

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat tersebut disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut.

Tahapan-tahapan penggunaan aplikasi E-Court adalah sebagai berikut :

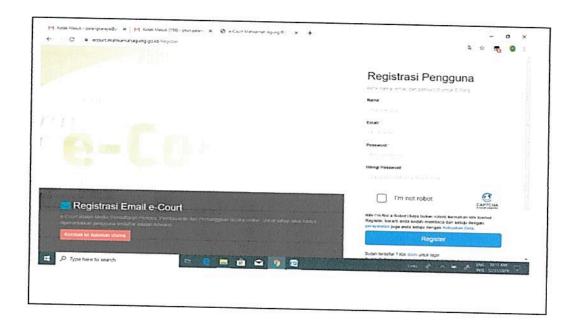
1. Pendaftaran akun pengguna terdaftar

Membuka website e-court Mahkamah Agung di

https://ecourt.mahkamahagung.go.id akan tampil seperti sebagai berikut :



Tekan tombol Register Pengguna Terdaftar , kemudian akan tampil akun pengguna terdaftar yang nantinya apabila pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar akan mendapatkan *email user* dan *password* untuk dapat login pada aplikasi e-court, seperti sebagai berikut :



2.Login



Setelah berhasil login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat sesuai dengan persyaratan yang telah diatur pada Perma no. 3 Tahun 2018 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Kemudian untuk bisa beracara, selanjutnya penguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

3.Pendaftaran perkara

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid, maka berikutnya adalah pendaftarn perkara:

- a) Memilih pengadilan
- b) Mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara)
- c) Pendaftaran kuasa
- d) Mengisi data pihak
- e) Upload berkas gugatan
- f) Pengguna terdaftar selanjutnya akan menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar (E-SKUM)
- g) Pembayaran (E-Payment)
- h) Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara online telah selesai dan menunggu pemanggilan dari pengadilan.

Pada Tahun 2020 Perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah wajib didaftarkan melalui Aplikasi E-Court. Adapun jumlah perkara yang masuk melalui aplikasi e-court sebanyak 34 perkara (30 perkara, 2 FP dan 1 KI)

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PTUN Palangka Raya

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah salah satu aplikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya khususnya informasi perkara dan persidangan.

Berikut adalah perangkat keras yang telah tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mendukung Teknologi Informasi khususnya SIPP:

1. Perlengkapan Server SIPP

No.	Perangkat	Ruang	Ket
1	Modem Astinet 4945136	Server	Line Fax
2	Mikrotik Routerboard 1100AHX2	56.76.	Rack System
3	UPS APC 3.000 Watt		Nack System
4	Server Fujitsu Primergy RX1330 M1(Server SIPP)	1	*
5	Switch Hub D-Link 10/100 switch Des 1016 D	-	
6	Rack Server	1 1	
7	PC dan CPU Inspur		
8	Printer Canon MX 497		
9	Server Fujitsu Primergy 1X1330M4 (Server SIPP pendukung E-Court)		Baru
10	Rack Server Indo rack		Baru
11	Modem Indihome 162401310399	Aula Depan (Lobby)	
12	Wireless Acces Point TP.Link	Aula (Ketua)	
13	Wireless Acces Point TP.Link	Perkara	
14	Wireless Acces Point Fiberhome	Anla Dana (I. II.)	
	The finding	Aula Depan (Lobby)	

2. Perangkat PC, Laptop dan lain-lain sebagai Client Pengguna SIPP

No.	. Perangkat	Ruang
1	-	Ketua
_	Printer Canon PIXMA IP 2770	0.335,374994799503
2	PC Acer dan CPU Acer Intel Core i3	PTSP
	Wireless TP.Link	7
	PC HP Intel Core i5 (Baru)	7
	PC HP Intel Core i5 (Baru)	-
	PC HP Intel Core i5 (Baru)	4
	UPS APC 700 watts (Baru)	4
	UPS APC 700 watts (Baru)	-
	UPS APC 700 watts (Baru)	-1
	Scanner Canon 5600 F	1
	Printer Canon PIXMA IP 2770	-
3	PC dan CPU Lenovo Intel Core i5	1111:
	Printer Canon G2010	Hakim
	Wireless TP. Link	-
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Lapton Fujitsu Intel Core 13 Lifebook E448	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	<u> </u>
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Laptop Toshiba L635	
	Laptop Asus Vivobook 14 inci	1
4	Laptop Asus Vivobook 14 inci	
4	PC dan CPU Lenovo Intel Core i5	Panitera
	Laptop Toshiba L635]
	Printer Canon 62000	
5	Wireless TP. Link	
5	PC Acer Intel Xeon 2.00 GB	Sub Bag. Perencanaan, TI, dan
	Laptop Dell Intel Pentium Inspiron 11	Pelaporan
	CPU HP. Proliant ML 350	
	UPS ICA CE 1200	
	Printer PIXMA Canon G4010	
6	PC Intel Core i5	Panitera Muda Perkara
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Printer Canon PIXMA IP 2770	
7	PC Compaq W1859	Staf Kepaniteraan Perkara
	CPU Acer Intel Pentium (Aspire)	- Family and Circle
3	PC dan CPU Acer Intel Core i3	Panitera Muda Hukum
	PC Compaq dan CPU Acer Intel Pentium	
	Stavol Dankyu	
	Laptop Toshiba Satellite L510 Intel Core duo	
)	PC dan CPU Acer Intel Core i3	Panitera Pengganti
Ī	PC dan CPU Acer Intel Core i3	Tamtera Pengganti
İ	PC dan CPU Acer Intel Core i3	
f	Printer Canon PIXMA G1000	
0	PC dan CPU Lenovo Intel Core i3	v : ::==
1	Printer Canon PIXMA G2000	Kasir (E-Payment)
	TIMEET CAHOII FIAMA GZUUU	

No.	Perangkat	Ruang
11	PC Lenovo	Meja Informasi
12	PC Dell Intel Core i3	E-SKUM
13	Vestouch Interactive Android KiosK21,5	Pendukung E-Court (Baru)
14	PC Samsung dan CPU Lenovo Intel Core i5	Lobby

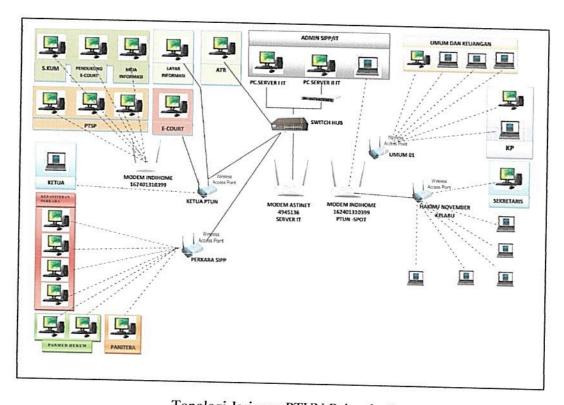
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2019, mendapatkan bantuan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung E-Court diantaranya sebagai berikut :

- 1 unit Server Fujitsu Primergy 1X1330M4
- 1 unit Rack Server
- 3 unit PC HP AIO Pro One 600 G5
- 3 unit UPS APC
- 1 unit Vestouch Interactive Android KiosK21,5
- 2 unit Laptop Asus Vivobook 14 inci

Pada Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mendapatkan tambahan dari pengadaan barang dan jasa diantaranya 2 (dua) unit PC dan CPU Lenovo Intel Core i5.

4. Infrastruktur Local Area Network pendukung SIPP

Dalam upaya meningkatkan kecepatan akses terhadap Aplikasi SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sinkronisasi data SIPP Lokal dengan SIPP Mahkamah Agung, sinkronisasi data SIPP Lokal dengan SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan Sinkronisasi data SIPP Lokal dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung pada pelaksanaan upload putusan ataupun e-document upaya hukum. Bandwidth internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020 telah menggunakan Modem Astinet 4945136 dan didukung pula dengan jaringan internet untuk PTSP Modem Indihome 162401310399.



Topologi Jaringan PTUN Palangka Raya

Dan berikut adalah infrastruktur Local Area Network (LAN) dan Wireless Access Point (WAP):

- a. 5 titik kabel yang langsung ke ruang server (Modem Astinet)
- b. 3 buah Wireless Access Point yang langsung ke server
- c. 6 titik kabel pada Modem Indihome 162401310399

Dengan tersedianya perangkat keras dan infrastruktur Local Area Network yang cukup, dapat memudahkan pengguna baik Hakim, Tenaga Teknis Kepaniteraan, maupun masyarakat mengakses data pada aplikasi SIPP.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance Excellent-ICPE).

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2015.

Pada Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: TAPM.13-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2018 dengan Nilai CUKUP.

Kemudian pada Tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terus melakukan perubahan dan perbaikan disegala area sehingga kemudian berhasil memperbaiki segala kekurangannya dengan meraih Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai A "Excellent" dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: TAPM.16-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2019.



- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur, terjangkau serta pelayanan yang prima, akuntabel, anti KKN, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan perubahan system pelayanan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan arahan dan instruksi dari Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 462/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 08 Agustus 2018.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian biaya panjar perkara hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2018 sampai sekarang. Untuk terus dapat memberikan pelayanan yang prima, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terus melakukan perbaikan sarana prasarana seperti melengkapi fasilitas ruang tunggu, sarana administrasi dan penunjang lainnya.



Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada PTUN Palangka Raya Tahun 2020



Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada PTUN Palangka Raya Tahun 2020



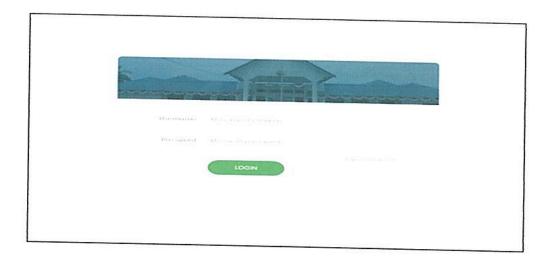


- Inovasi Pelayanaan Publik

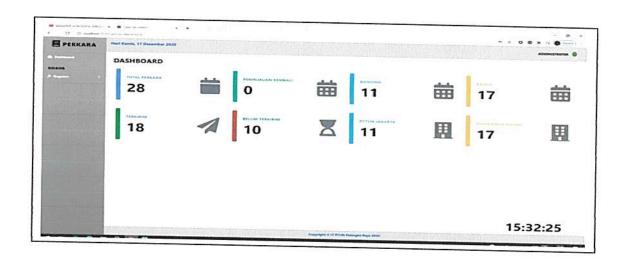
APLIKASI UPAYA HUKUM PADA PTUN PALANGKA RAYA

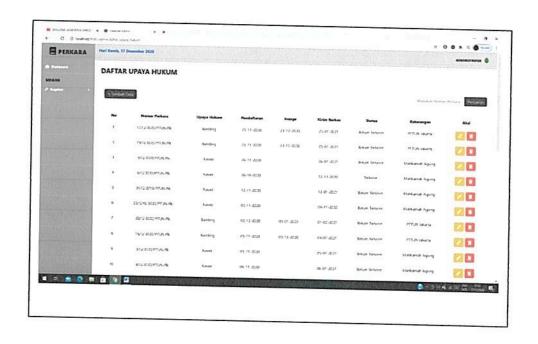
By Mareh Dayanu, S.Kom

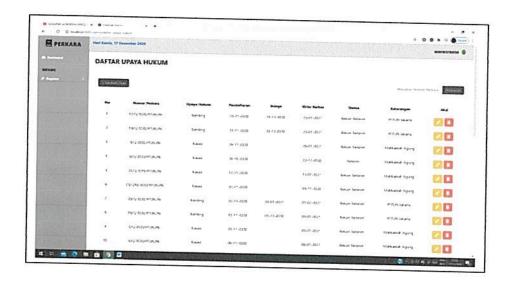
1. Membuka Aplikasi Upaya Hukum

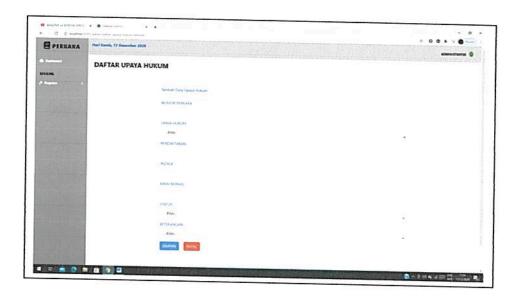


2. Tampilan Aplikasi Upaya Hukum











BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam penerapan dan optimalisasi sistem pengawasan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan 2 (dua) sistem pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan Melekat

Adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektik dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pengawasan internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: W2.TUN6/795/K/PW.03.09/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

B. EVALUASI

Dalam melakukan tugas pengawasan, Hakim Pengawas Bidang harus senantiasa berpegang pada Buku IV Mahkamah Agung tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan.

Hakim Pengawas Bidang juga secara objektif menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) dan selanjutnya koordinator melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masingmasing bidang sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: W2.TUN6/795/K/PW.03.09/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS
1	ANDRY ASANI, SH., MH NIP. 19710409 199603 1 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	WAKIL KETUA/HAKIM MADYA MUDA PTUN P.RAYA	KOORDINATOR
2	MOHAMAD YUSUP, SH NIP. 19821002 200904 1 008	PENATA (III/c)	HAKIM PRATAMA MADYA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN PERKARA
3	FRANS CH. SUBROTO, SH NIP. 19860525 200912 1 006	PENATA (III/c)	HAKIM PRATAMA MADYA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN HUKUM
4	FAISAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH NIP. 19820416 2009012 1 002	PENATA (III/c)	HAKIM PRATAMA MADYA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUBBAG PERENCANAAN, TI
5	TRI JOKO SUTIKNO,S.Sos., SH., MH NIP. 19801018 200912 1 001 DITA DWI ARISANDI, SH	PENATA (III/c) PENATA MUDA	HAKIM PRATAMA MADYA PTUN P.RAYA	DAN PELAPORAN PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUBBAG UMUM DAN
6	NIP. 19901207 201712 2 001 SEKAR ANNISA, SH NIP. 19941109 201712 2 003	(III/a) PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PRATAMA PTUN P.RAYA HAKIM PRATAMA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,
				ORGANISASI DAN TATALAKSANA

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Terdapat jabatan yang kosong yaitu Jabatan Ketua pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikarenakan mutasi.
- Rumah Dinas Jabatan Hakim yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 7 (tujuh) unit. Untuk Rumah Dinas Tenaga Teknis seperti Panitera/Panitera Pengganti belum tersedia.
- 3. Perlu adanya penambahan kendaraan bermotor dan mobil dinas khususnya untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dll
- 4. Gedung pengadilan yang belum memenuhi syarat/prototype seperti arahan Mahkamah Agung RI
- 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak memiliki Generator Set untuk mengantisipasi setiap ada pemadaman aliran listrik.
- 6. Aplikasi Pengaduan Online (SIWAS Mahkamah Agung RI) memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan pengadilan dan kode etik pegawai.
- 7. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI memberikan informasi aktual proses perkara di pengadilan.
- 8. Aplikasi e-Court memudahkan advokat untuk mendaftarkan perkara tanpa harus datang ke Pengadilan.
- 9. Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) memudahkan kontrol pelaksanaan aplikasi SIPP.

B. Rekomendasi

- Jabatan Ketua Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diharapkan segera terisi untuk mengurangi beban kerja Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu penambahan dana dalam DIPA tahun 2021 guna menunjang pelaksanaan pekerjaan melalui penambahan sarana dan prasarana.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berharap gedung pengadilan segera memenuhi kriteria/prototype seperti arahan dan petunjuk Mahkamah Agung RI.
- Dengan adanya Sistem pengawasan yang efektif, dapat mencegah tindakan serta perilaku / perbuatan tercela yang dilakukan oleh setiap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111 PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR: W2-TUN6/ 795 /K/PW.03.09/VII/2020

TENTANG

HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Membaca

: Ketentuan Pasal 113 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang yang menyatakan bahwa Ketua mengatur tugas Para Hakim, serta Buku IV Mahkamah Agung tentang Pengawasan.

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi peradilan dalam bidang teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan agar terwujud pelayanan publik yang baik;
 - b. Bahwa untuk mengendalikan agar fungsi lembaga peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan pengawasan terhadap setiap bidang secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan;
 - d. Bahwa untuk melakukan pengawasan setiap bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di pandang perlu membentuk Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/036/SK/VII/1993 tanggal 17 Juli 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara:

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 309/SEK/01/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA **NEGARA** PALANGKA RAYA TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pertama

Palangka Raya Nomor W2-TUN6/87/K/PW.03.09/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Palangka Raya;

: Menunjuk Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Kedua

yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2,4 dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang;

: Bahwa dalam melakukan tugas Pengawasan, Hakim Pengawas Bidang Ketiga yang ditunjuk tersebut harus senantiasa berpegang pada Buku IV

Mahkamah Agung tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan;

: Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara obyektif dan Keempat menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 3 (tiga)

bulan sekali (triwulan) dan selanjutnya Koordinator Pengawas melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di Kelima

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk Keenam

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal 01 Juli 2020

SAHA NEGARA PALANGKA RAYA PENGADILAN TA

> DENDEN PRATIWI, S.H., M.H. NIP 19721026 199203 2 001

NA, M

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
- Masing-masing yang bersangkutan; 2.

Pertinggal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadil′ Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ 子ダS/K/Pvv:づ3.09/VII/2020 Tanggal : 01 Juli 2020 Tentang : Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

						ara		Ę				T				1			
TUGAS HAKIM PENGAWAS	5		KOORDINATOR			Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perkara		Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum		rengawas Bidang Administrasi Sub Bagian	Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	_	Pengawas Bidang Administrasi Sub Bogica	Umim dan Kenanan	כייים ממו אפתמופמו		Pengawas Bidang Admininters 1971	Kononana Oranii III III III III Daglan	Nepegawalan, Organisasi dan Tata Laksana
JABATAN	4	Wakil Ketua /	Hakim Madya Muda	PTUN Palangka Raya	Hakim Pratama Madya	PTUN Palangka Raya	Hakim Pratama Madva	PTUN Palangka Raya	Hakim Bratama Madia	i atama Madya	PTUN Palangka Raya	Hakim Pratama Madya	PTUN Palangka Raya	Hakim Pratama	PTUN Palangka Rava		Hakim Pratama	PTUN Palandka Rava	
PANGKAT/ GOL. RUANG	3	Pembina Tk I	(4//N)		Penata	(III/c)	Penata	() /c)	Penata		()III(c)	Penata	(JIII/c)	Penata Muda	(III/a)		Penata Muda	(III/a)	
NAMA/NIP	2	ANDRY ASANI, S.H., M.H.	NIP. 19710409 199603 1 001		MOHAMAD YUSUP, S.H.	NIP. 19821002 200904 1 008	FRANS CH. SUBROTO, S.H.	NIP. 19860525 200912 1 006	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.	NIP 19820416 200912 1 002		TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.	NIP. 19801018 200912 1001	DITA DWI ARISANDI, S.H.	NIP. 19901207 201712 2 001	SEKAR ANNISA, S.H.	NIP. 19941109 201712 2 003	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.	NIP. 19940430 201712 2 006
o .		,			2		к			4 Z	- 1	_	2 2		Z	S	Z		Z

PENGADILANTATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111 PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR: W2-TUN6/ 793 /K/PW.03.09/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Membaca

: Amanat yang diinstruksikan dalam Buku IV Mahkamah Agung tentang

Pengawasan.

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi peradilan dalam bidang teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, pelaksanaan tugas umum peradilan dan finansial agar terwujud pelayanan publik yang baik:
 - b. Bahwa untuk mengendalikan agar pengelolaan keuangan lembaga peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2020 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (belanja modal) secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2020 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (belanja Modal) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Intern (SPI) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI:
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 4. SEMA Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
 - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/ 2006 Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksaaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA **TENTANG PEMBENTUKAN** SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) PADA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PALANGKA RAYA

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pertama

Palangka Raya Nomor W2-TUN6/102/K/PW.03.09/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Kedua

Usaha Negara Palangka Raya;

Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum Ketiga dalam lajur 2,4 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawas

Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Tujuan Pokok Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah : Keempat

1. Melakukan Pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2020 khususnya dalam pengadaan barang dan jasa (belanja modal);

2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan rekomendasi:

3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara rutin setiap bulan;

Pengawasan tersebut tetap berpedoman ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Palangka Raya

Pada tanggal

01 Juli 2020

PENGADILAN TA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA ETUA, M

> ENOEN PRÁTIWI, S.H., M.H. 19721026 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI di Jakarta; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);

3. Pertinggal.

ξ,

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ 名多 /K/PW.03.09/VII/2020 Tanggal : 01 Juli 2020 Tentang : Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Ø
Raye
_
gkg
ä
<u>a</u>
Ø
vegara
Se
g
sana
~

9	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS /KEDUDUKAN DALAM SATUAN
_		33		TENGAVAS IN EKN
			+	သ
-	ANDRY ASANI, S.H., M.H. NIP. 19710409 199603 1 001	Pembina Tk I (IV/b)	Wakil Ketua / Hakim Madya Muda	Ketua
c	HERU PAMUNGKAS S.T.		гтом Рагандка Кауа	
7	NIP. 19750625 200604 1 001	(IV/a)	Sekretaris PTLIN Palandes Baue	Sekretaris
		(5.1.1)	I LOIN Falaligha haya	
8	NIP. 19801018 200912 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Rava	Anggota
35				
	NIP. 19901207 201712 2 001	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama PTUN Palandka Rava	Anggota
			5 (b)	

PENGADILAN LATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

OENDEN PRATIWI, S.H., M.H.

PENGADILAN